

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI
KARIMUN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.1)**



OLEH

**SUNARDI
10224020086**

**PROGRAM S.I
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2009**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI
KARIMUN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.1)**



OLEH

**SUNARDI
10224020086**

**PROGRAM S.I
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2009**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"**, dan pelanggaran kesusilaan di penelitian ini berupa kegiatan prostitusi dan fokus penelitiannya adalah pelaksanaan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun, salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Karimun.

Adapun latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini dalam penelitian ilmiah yang penulis tulis untuk penulisan skripsi adalah karena penulis melihat, bahwa Daerah Kabupaten Karimun khususnya Kota Tanjung Balai Karimun sering terjadi atau semakin banyaknya pelanggaran kesusilaan yang berkembang terutama kegiatan prostitusi, dan hal ini sangat mengganggu dari pada kehidupan masyarakat baik itu moral atau mental kualitas fisik (kesehatan) masyarakat, walaupun telah adanya peraturan Daerah untuk mengaturnya, dan untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh, bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah tersebut dan faktor-faktor yang menghambat dan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini bersifat penenelitian lapangan (*field research*) dan yang menjadi sasaran penelitian yaitu di Daerah Kota Tanjung Balai Karimun yang terletak di Kecamatan Karimun,

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan didalam penelitian ini, penulis mendapatkannya dari Instansi-instansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Perda tersebut, terutama pelaksanaan penertiban prostitusi, yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP), dan Dinas Sosial, data tersebut penulis namakan data *primer* yang penulis peroleh melalui *wawancara* dan *observasi*, sedangkan data-data yang penulis peroleh dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen pendukung, penulis kategorikan kepada data *skunder*.

Setelah data-data tersebut penulis dapatkan, penulis menganalisa dengan pendekatan *deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan kaedah-kaedah *subjek* dan *objek* penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada setelah itu diadakan kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

Dari hasil penelitan ini, bahwa pelaksanaan Perda tersebut, khususnya terhadap pelaksanaan penertiban kegiatan prostitusi belum optimal dilakukan, hal ini disebabkan begitu banyaknya hambatan didalam pelaksanaannya baik itu yang bersifat *intern* maupun *ekstern*.

Mmenurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Perda tersebut khususnya terhadap pelaksanaan penertinan kegiatan prostitusi tidaklah bertentangan, kecuali terhadap penerapan sanksi atau hukuman terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi, dan terhadap faktor penghambat dari pelaksanaan, Pemerintah Daerah terutama Instansi yang diberi wewenang untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi	
1. Geografi.....	12
2. Demografi	14
B. Agama dan Pendidikan	
1. Agama	17
2. Pendidikan.....	19
C. Ekonomi dan Pariwisata	
1. Ekonomi	21
2. Pariwisata.....	23

BAB III. TINJAUAN UMUM PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN

A. Latar Belakang Terbentuknya Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun ..	25
B. Proses Terbentuknya Perda No.06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun	30
C. Upaya (Strategi) Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun	31
D. Ketentuan Larangan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun	32

BAB IV. PELAKSANAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Perda No 06 Tahun 2002 Terhadap pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Tanjung Balai Karimun	34
1. Mekanisme atau Prosedur Pelaksanaan	34

2.Sanksi Terhadap Yang Melakukan Kegiatan Prostitusi.....	40
3.Wewenang Alat Negara Menindak Pelanggar Perda	41
4.Usaha atau Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Munculnya Kegiatan Prostitusi	42
B. Faktor-faktor yang Menghambat dari Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun.....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun.....	49
1. Terhadap Pelaksanaan.....	49
2. Terhadap Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan.....	63

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel II.1 Jumlah penduduk Kecamatan Karimun berdasarkan jenis kelamin.....	14
2. Tabel II.2 Klafikasi penduduk Kecamatan Karimun berdasarkan Desa dan Kelurahan	15
3. Tabel II.3 Klafikasi berdasarkan tingkat usia	16
4. Tabel II.4 Klafikasi agama Kecamatan Karimun.....	17
5. Tabel II.5 Sarana ibadah di Kecamatan Karimun	18
6. Tabel II.6 Tokoh agama di kecamatan Karimun.....	19
7. Tabel II.7 Sarana pendidikan di Kecamatan Karimun	19
8. Tabel II.8 Klafikasi penduduk berdsarkan pendidikan di Kecamatan Karimun.....	20
9. Tabel II.9 Klafikasasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	22
10. Tabel II.10 Kondisi hotel berikut jumlah kamar	23
11. Tabel II. 11 Fasilitas pendukung pariwisata	24
12. Tabel IV.12 Rekapitulasi hasil razia pekerja seks komersial	36
13. Tabel IV.13 Rekapitulasi hasil pemulangan pekerja seks komersial.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, semakin besar pula tekanan yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, karena tidak semua masyarakat yang siap menerima perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Keadaan ini akan menimbulkan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Memasuki era globalisasi di berbagai bidang, khususnya dalam dunia komunikasi telah memudahkan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita terasa sulit untuk dibendung, dan masuk begitu saja tanpa filter. Pengaruh negatif sudah dapat kita lihat dan rasakan terutama bagi kelompok usia remaja, dan bahkan terhadap mereka yang tidak dapat dikatakan muda lagi, apalagi ditunjang dengan iklim reformasi, maka keinginan untuk dan mengungkapkan kebebasan seakan-akan mendapat kesempatan. Peredaran narkoba, alcohol, pornografi, pornoaksi dan VCD porno beredar bebas di pasar, akan menunjang ekspresi dari kebebasan seksual dan hal ini berarti tindak pelanggaran kesusilaan semakin merebak.

Salah satu tindak pelanggaran kesusilaan yang menyimpang atau normatif dalam masyarakat adalah kegiatan prostitusi atau pelacuran yang harus diberantas dan dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha

pencegahan dan perbaikannya, karena besarnya akibat negatif yang dirasakan dari kegiatan tersebut.

Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal¹.

Soedjono D. SH, mengatakan bahwa pelacur itu berasal dari bahasa latin “prostitutio”, yang artinya sebagai pelaku terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan, sedangkan perzinahan itu sendiri berarti perhubungan kelamin antara laki-laki dan seorang perempuan, baik salah satu ataupun kedua-duanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, selain dari mereka yang berperanan dari adegan perzinahan itu. Atau dengan kata lain pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran². Didalam peraturan daerah NO. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan mengatakan bahwa prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah-hadiah tertentu sebagai suatu transaksi perdagangan³.

Pelacuran merupakan propesi yang sangat tua usianya setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-7, Edisi 2, h. 177.

² Soedjono D. SH, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), Cet. Ke-1, h. 14

³ Pemerintahan Daerah KAB. Karimun, *Peraturan Daerah NO. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Karimun*. 2002.

tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Walaupun terdapat unsur-unsur psikologis yang melatar belakangi kejahatan tersebut, dalam banyak hal unsur-unsur ekonomi dan sosial sangat berpengaruh dan sangat memegang peranan atas perkembangan prostitusi.

Adanya praktek prostitusi yang dipandang sebagai pekerjaan yang menyimpang ini justru juga diakibatkan oleh semakin banyaknya tempat-tempat prostitusi. Tempat-tempat prostitusi ini ada yang dikoalisiikan secara resmi, bahkan hotel-hotel, penginapan-penginapan, salon, panti pijat dan warung-warung kecil dipinggir jalan yang dikenal dengan warung remang-remang disinyalir sebagai tempat seperti tersebut sebagai penarik pengunjung. Kadang terlihat bahwa praktek prostitusi ini merupakan bagian dari bisnis dalam mencari keuntungan.

Didaerah Kabupaten Karimun tempat-tempat prostitusi banyak ditemukan, seolah-olah mereka bebas untuk mendirikan lokalisasi prostitusi, bahkan tempat ini sangat mudah dan di jangkau, dan dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Diantaranya seperti Payalabu, Villa-villa, hotel-hotel, diskotik-diskotik, panti pijat dan warung remang-remang yang diduga sebagai tempat tersebut.

Kegiatan prostitusi kebanyakan ada di kota-kota, daerah-daerah lalu lintas para turis dan tempat plesir-plesir, dimana banyak didatangi orang-orang yang

berlibur, beristirahat atau berwisata. Pada umumnya, ditempat tersebut diterapkan prinsip 4-S dari taurisme , yaitu *Sea* (laut dan adanya air), *Sun* (ada matahari), *Service* (pelayanan) dan *seks*. Maka untuk menyelenggarakan pelayanan seks guna pemuasan kebutuhan baik kaum pria maupun wanitanya, diselenggarakan praktek-praktek pelacuran, secara resmi dibordil dan lokasi tertentu, ataupun secara tidak resmi merembes ke hotel-hotel, penginapan dan tempat hiburan⁴.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan daerah Kabupaten Karimun yang letaknya berada diantara kota Batam, Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadi karimun sebagai tempat yang strategis, terutama untuk berbagai kegiatan perekonomian seperti pariwisata dan tidak jarang terjadinya kegiatan prostitusi.

Karena banyaknya terjadi tindakan pelanggaran kesusilaan di Kabupaten Karimun terutama kegiatan prostitusi, dan takut berdampak negatif terhadap mental atau moral, kesehatan masyarakat dan martabat bangsa di Kabupaten Karimun terutama di kota Tanjung Balai Karimun sehingga Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari DPRD mengeluarkan peraturan daerah No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan yang tujuannya untuk memberantas penyakit masyarakat terutama adalah masalah prostitusi.

Dengan peraturan daerah yang dikeluarkan ini diharapkan mampu mengurangi kegiatan prostitusi, tapi sebaliknya masih semarak juga terjadinya kegiatan prostitusi. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dari pelaksanaan Perda tersebut baik itu bersifat internal maupun eksternal. Walaupun pelaku kegiatan prostitusi sukar diberantas karena selama masih ada

⁴ Kartini Kartono, *op.cit.*, h. 180.

Besarnya dampak negatif yang diakibatkan dari perzinahan sehingga Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menghukum pezina baik itu laki-laki maupun perempuan dengan hukuman yang seberat beratnya, yang belum kawin dengan 100 kali cambukan dan dirajam sampai mati bagi pezina laki-laki dan perempuan yang sudah kawin dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.

Dengan latar belakang yang terjadi di lapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Pelaksanaan Peraturan Daerah NO. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, serta permasalahan yang akan diteliti, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mendekati sasaran yang dikehendaki. Adapun batasan masalah tersebut hanya sebatas pelaksanaan peraturan daerah No. 06 tahun 2002 pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran kesusilaannya berupa penertiban terhadap kegiatan prostitusi atau pelacuran di Kota Tanjung Balai Karimun ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap permasalahan sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan khususnya pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dari pelaksanaannya.
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah-masalah tersebut.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perda No. 02 tahun 2002 tentang penertiban prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dari pelaksanaannya.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Karimun serta memperlihatkan hambatan yang terjadi dilapangan selanjutnya kebijakan yang akan datang dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
 - c. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riseach*) pada tahun 2007 dan mengambil lokasi di Kota Tanjung Balai Karimun. Kota Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Karimun. Lokasi ini dipilih karena Kota Tanjung Balai Karimun termasuk Daerah lalu lintas para turis yang berbisnis, berlibur, beristirahat, atau berwisata, karena letaknya yang strategis dekat dengan Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dan dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap turis tidak terlepas dari pelayanan seks guna pemuasan kebutuhan baik dari kaum pria maupun wanitanya sehingga diselenggarakannya praktek-praktek prostitusi. Walaupun ada peraturan daerah yang secara jelas melarang kegiatan prostitusi, tapi masih semarak kegiatan tersebut terjadi di masyarakat Kota Tanjung Balai Karimun. Karna hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan.

2. *Subjek* dan *Objek* Penelitian

- a. *Subjek* penelitian ini adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP), Kapolres yang ada di Kota Tanjung Balai Karimun sebagai penegak Perda, dan Dinas Sosial sebagai Instansi yang menangani masalah sosial.
- b. *Objek* penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan daerah No. 06 tentang pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu-individu yang menjadi subjek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau beberapa populasi. Yang menjadi populasi adalah Instansi-instansi yang diberi wewenang didalam melaksanakan Perda No. 06 tahun 2002 terutama penertiban prostitusi, yaitu Instansi Kepolisian, Instansi Satuan Polisi Pamong Praja, dan Instansi Dinas Sosial, dan sebagai sampel masing- masing dari populasi diambil 2 orang sebagai perwakilan, yaitu 2 orang dari Instansi kepolisian, 2 orang dari Instansi Sat Pol PP dan 2 orang dari instansi Dinas Sosial, dan pengambilan sampel seperti ini disebut dengan nama *sampling random*.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini meliputi dua katagori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. *Sumber Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian, yaitu Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Kapolres dan Dinas Sosial.
- b. *Sumber Data Sekunder*, yaitu data pendukung yang diperoleh dari anggota DPRD, tokoh masyarakat, dokumen-dokumen, data-data yang tersedia di kantor yang berhubungan dengan penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Wawancara*, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan tanya jawab secara langsung kepada responden, yaitu anggota DPRD, tokoh masyarakat, Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Kapolres dan Dinas Sosial.

b. *Observasi*, yaitu penulis turun langsung ke lokasi untuk melihat dari dekat permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan peraturan daerah No. 06 tahun 2002, dan observasi yang penulis lakukan dengan melakukan pengamatan langsung di tempat-tempat yang biasa dilakukan pelanggaran kesusilaan, seperti di Paya Labu (tempat prostitusi), tempat-tempat hiburan, seperti Karouke, penginapan dan *maseg* (tempat pijit).

6. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dideskripsikan, diinterpretasikan dan kemudian dianalisis. Deskripsi dari hasil penelitian dijelaskan secara kualitatif, dan diberi penjelasan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

7. Metode Penulisan

- a. *Metode Deduktif*, yaitu penulis mengumpulkan data-data dan keterangan serta pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Metode Induktif*, yaitu dengan mengambil fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. *Deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisikan gambaran umum lokasi penelitian yang memuat : Kondisi geografis dan demografis, Ekonomi, Pendidikan dan Bidang Pariwisata.

BAB III Menguraikan gambaran umum tentang prostitusi, dan Perda No. 06 Tahun 2002. Gambaran umum Prostitusi yang terdiri dari pengertian, sejarah prostitusi, penyebab timbulnya, dan dampak yang ditimbulkan prostitusi,, sedangkan gambaran umum Perda No. 06 Tahun 2002, yang terdiri dari latar belakang terbentuknya Perda, proses terbentuknya Perda dan ketentuan larangan Perda.

BAB IV Pelaksanaan perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjung Balai Karimun, bab ini merupakan hasil penelitian lapangan yang memuat, tentang pelaksanaan perda No. 06 tahun 2002 tentang panertiban prostitusi, faktor-faktor yang menghambat dari pelaksanaan tersebut, dan tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

BAB V Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi

1. Geografi

Kota Tanjung Balai Karimun merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Karimun. Terbentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No. 53 tahun 2002 yang terdiri dari 16 pulau besar maupun kecil dengan luas daratan lebih kurang 48 Km dan luas lautan 1.353 Km yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 22 Desa meliputi 26 RW dan 103 RT 4 Kelurahan berada di Ibu Kota Kecamatan sedangkan 2 berada terpisah dari Ibu Kecamatan. Diantaranya adalah Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kelurahan Teluk Air, Kelurahan Sungai Lakam, Kelurahan Lebuk Semut, Desa Parit dan Desa Tulang, batas wilayah Kecamatan Karimun :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tebing
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kundur dan Buru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meral
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan tetangga Singapura dan Malaysia

Kecamatan Karimun terdiri dari daratan rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah berada antara 1 sampai 9 M diatas permukaan laut, yang terjadi pada bulan September sampai Januari dan musim panas terjadi pada

Bulan Februari sampai Agustus. Suhu di Kecamatan Karimun berada antara 25-32 dengan curah hujan 22,4 MM per tahun⁷.

Kecamatan Karimun yang ber Ibu Kota Tanjung Balai Karimun, merupakan dataran yang menjirik ke laut atau sebuah Tanjung. Tempat ini dahulunya digunakan sebagai tempat persinggahan dan permusyawaratan para raja Melayu. Itulah sebabnya disebut dengan Balai, sedangkan kata Tanjung berasal dari bahasa Melayu yang berarti pertemuan yang menyenangkan dan membahagiakan. Jadi Tanjung Balai Karimun merupakan tempat bermusyawarah, karena tempat tersebut tempat yang menyenangkan dan membahagiakan bagi raja tersebut⁸.

Kecamatan Karimun yang sebelah Timur berbatasan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan dan Malaysia dengan melihat batas wilayah tersebut sehingga letaknya yang sangat strategis menjadikan daerah ini sebagai transit baik sebagai persinggahan, lalu lintas perdagangan maupun sebagai tempat pelabuhan kapal yang melakukan perjalanan Singapura dan Malaysia maupun Batam dan Tanjung Pinang. Sehingga Karimun merupakan tempat yang strategis bagi para pedagang baik sebagai turis lokal maupun asing. Hal ini dimungkinkan Karimun mempunyai berbagai etnis baik Cina, Jawa, Bugis, Minang, dan Melayu. Melayu yang merupakan orang pribumi asli Kecamatan Karimun yang jumlahnya relatif besar dibandingkan yang lainnya.

⁷ Ghaiba, Sindu, Drs., dan Sopyan, Edy, Drs, *Karimun Dalam Angka*, (Tanjung Balai Karimun: kerja sama BAPEDA dan BPS Kabupaten Karimun, 2005), Cet. Ke-1, h.9.

⁸*Ibid.*

2. Demografi

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kantor Camat Karimun, bahwa jumlah penduduk Karimun berjumlah 41.066 jiwa untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini;

TABEL II. 1
JUMLAH PENDUDUK KEC. KARIMUN BERDASARKAN JENIS
KELAMIN

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	Persentase
1	Laki-laki	20.540	50,02
2	Perempuan	20.526	49,98
	Jumlah	41.066	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun.

Berdasarkan sumber di atas bahwa penduduk berjumlah 41.066 jiwa. Dengan jumlah laki 20.540 atau 50,02 % dan perempuan 20.526 jiwa atau 49,98 %. Dari jumlah diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-aki lebih banyak dari jumlah perempuan.

Dari data di atas jumlah penduduk Kecamatan Karimun jika dirinci berdasarkan Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Karimun yaitu Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kelurahan Sungai Lakam , Kelurahan Teluk Air, Kelurahan Lubuk Semut, Desa Parit dan Desa Tulang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

TABEL II. 2
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN KARIMUN BERDASARKAN
DESA DAN KELURAHAN DESA

NO	Kelurahan/Desa	Pria	%	Wanita	%	P+W	%
1	TBK	5.286	25,73	9.311	45,37	14.597	35,54
2	Teluk Air	4.449	21,67	3.110	15,15	7.559	18,41
3	Sei Lakam	7.541	36,71	5.007	24,37	12. 018	29,26
4	Lubuk Semut	1.536	7,48	1.360	6,62	2.896	7,05
5	Parit	1.099	5,35	1.056	5,14	2.155	5,25
6	Tulang	629	3,06	612	2,99	1.241	3,02
	Jumlah	20.540	100	20.526	100	41.066	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa klasifikasi penduduk Kecamatan Karimun berdasarkan Kelurahan dan Desa menunjukkan bahwa di Kelurahan Tanjung Balai Karimun jumlah penduduk laki-laki berjumlah 5.286 jiwa atau 25,73 % dan perempuan berjumlah 9.311 jiwa atau 45,37 % dengan jumlah keseluruhan 14.597 jiwa atau 35,54 % . Jumlah penduduk Kelurahan Teluk Air jumlah penduduk laki-laki berjumlah 4.449 jiwa atau 21,67 % dan perempuan berjumlah 3.110 jiwa atau 15,15 % dengan jumlah keseluruhan 7.559 jiwa atau 18,41 %, jumlah penduduk Sungai Lakam, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 7.541 jiwa atau 36,71 %, dan jumlah perempuan berjumlah 5.077 jiwa atau 24,37 % dengan jumlah keseluruhan 12.018 jiwa atau 29,26 %, jumlah penduduk Kelurahan Lubuk Semut jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.536 jiwa atau 7,48 % dan jumlah perempuan berjumlah 1.360 jiwa atau 6,62 %, dengan jumlah keseluruhan 2.896 jiwa atau 7,05 % . Desa Parit jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.099 jiwa atau 5,35 %, dan perempuan 1.056 jiwa atau 5,14 %, dengan jumlah keseluruhan 2.155 jiwa atau 5,25 % . Desa Tulang jumlah

penduduk laki-laki berjumlah 629 jiwa atau 3,06 % dan perempuan 612 jiwa atau 2,99%, dengan jumlah keseluruhan 1.241 jiwa atau 3,02%.

Jika dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Tanjung Balai Karimun relatif besar jika dibandingkan dengan kelurahan dan Desa Yang ada.

TABEL II. 3
KLAFIKASIKAN BERDASARKAN TINGKAT USIA

N0	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	0-4 tahun	3.230	7,86
2	5-9 tahun	3.435	8,36
3	10-14 tahun	3.054	7,44
4	15-19 tahun	2.950	7,18
5	20-24 tahun	4.021	9,79
6	25-29 tahun	4.047	9,85
7	30-34 tahun	3.323	8,09
8	35-39 tahun	2.735	6,66
9	40-44 tahun	2.216	5,40
10	45-49 tahun	1.684	4,10
11	50-54 tahun	1.229	2,99
12	55-59 tahun	2.106	5,13
13	60-64 tahun	6.075	14,79
14	65-69 tahun	436	1,06
15	70-74 tahun	263	0,64
16	75 tahun keatas	262	0,64
	Jumlah	41.066	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan penduduk dilihat berdasarkan usia adalah 41.066 orang, dan yang terbanyak adalah golongan usia 60-64 yaitu jumlahnya sebanyak 6.075 jiwa atau 14,79%, sedangkan golongan usia yang paling sedikit adalah usia 75 tahun keatas dan jumlahnya sebanyak 262 jiwa atau 0,64 %.

B. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Masyarakat Kecamatan Karimun mayoritas beragama Islam disamping itu ada juga yang memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Namun jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan pemeluk agama Islam.

Agama mayoritas di daerah Kecamatan Karimun adalah beragama Islam dikarenakan disana jumlah penduduk suku melayu lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, disamping itu ada juga yang memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Namun jumlah relatif sedikit jika dibandingkan dengan pemeluk agama Islam.

Penganut agama Islam pada umumnya orang Melayu sedangkan pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik terdiri dari orang Batak dan Cina sebagian agama Budha, Hindu dan Konghucu.

Sementara itu jumlah penduduk Kecamatan Karimun kalau dilihat berdasarkan klasifikasi Agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II.4
KLASIFIKASI AGAMA DI KEC. KARIMUN

NO	Klasifikasi Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	27.036	65,83
2	Kristen Protestan	1.272	3,10
3	Kristen Katolik	575	1,40
4	Budha	5.412	13,18
5	Hindu	4.358	10,61
6	Konghucu	2.1415	5,89
	Jumlah	41.066	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun.

Dari perbandingan jumlah pemeluk agama yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Karimun mayoritas beragama Islam dengan jumlah 27,036 jiwa atau 65,83 %, sedangkan penganut kedua adalah Budha yaitu 1272 jiwa atau 3,10 % kemudian diikuti oleh Hindu yaitu 4.358 jiwa atau 10,61 %, Konghucu yaitu 2.1415 yaitu atau 5,89 % dan Kristen Protestan yaitu 1.272 jiwa atau 3,10 % dan Kristen Katholik yaitu 575 yaitu atau 1,40 %. Jika dilihat dari sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Karimun, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.5
SARANA IBADAH DI KECAMATAN KARIMUN

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	28	36,84
2	Mushalla	28	36,84
3	Greja	8	10,53
4	Vihara	3	3,95
5	Cetiya	7	9,21
6	Kelenteng	2	2,63
	Jumlah	76	100

Sumber Data : Kantor Camat Karimun, 2006

Berdasarkan gambaran tabel di atas bahwa tempat peribadatan yang paling banyak adalah tempat peribadatan bagi umat beragama Islam, Masjid berjumlah 28 buah atau 36,84 % dan Mushalla berjumlah 28 buah atau 36,84 %. Hal ini sesuai dengan jumlah penganut Islam merupakan penganut agama mayoritas sedangkan jumlah tempat peribadatan penganut agama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu relatif sedikit.

Dari jumlah rumah beribadah di atas dapat diketahui keberadaan jumlah tokoh agama yang ada di Kecamatan Karimun, untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.6
TOKOH AGAMA DI KECAMATAN KARIMUN

No	Tokoh Agama	Orang	Persentase
1	Ulama atau Mubaligh	48	77,42
2	Pendeta	6	9,68
3	Pastur	3	4,48
4	Biksu	4	6,45
	Jumlah	62	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tokoh agama yang ada di Kecamatan Karimun menunjukkan bahwa jumlah Ulama atau Mubaligh berjumlah 48 orang atau 77,42 %, Pendeta berjumlah 6 orang atau 9,68 %, Pastur berjumlah 3 orang atau 4,48 % dan Biksu 4 orang atau 6,45 %. Dari jumlah tersebut maka dapat dilihat bahwa tokoh agama umat Islam lebih banyak kalau dibandingkan dengan tokoh agama lain yang ada di Kecamatan Karimun.

2. Pendidikan

Selanjutnya faktor yang penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas adalah pendidikan, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan berbagai sarana dan prasarana guna menunjang tercapainya tujuan, dan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.7
SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN KARIMUN

NO	Sarana pendidikan	Buah	Persentase
1	Taman Kanak-kanak	8	19,51
2	Sekolah Dasar	18	43,90
3	SLTP	8	19,51
4	SLTA	5	12,20
5	Kursus	2	4,88
	Jumlah	41	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan sarana pendidikan yang ada sebanyak 41 buah, untuk taman kanak-kanak sebanyak 8 buah atau 19,51 %, Sekolah Dasar 18 buah atau 43,90 %, SLTP 8 buah atau 19,51 %, SLTA 5 buah atau 12,20 %, dan kursus 2 buah atau 4,88 %, jadi sarana pendidikan yang paling banyak adalah Sekolah Dasar. Dilihat dari jumlah keseluruhan sarana dan prasana, maka sangat mendukung sekali terhadap perkembangan pendidikan di Daerah di Kabupaten Karimun.

Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Karimun dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL II.8
KLASIFIKASI PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak atau Belum Sekolah	6.662	16,22
2	Taman kanak-kanak	9.701	23,62
3	Sekolah Dasar	4.496	10,95
4	SLTP	5.712	13,91
5	SLTA	6.696	16,30
6	Akademi	5.701	13,88
7	Mahasiswa S1	407	0,99
8	Mahasiswa S2	1.691	4,12
	Jumlah	41.066	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah sebanyak 6.662 orang atau 16,22 %, dan jumlah penduduk yang bersekolah, untuk Taman kanak-kanak 9.701 orang atau 23,62 %, Sekolah Dasar 4.496 orang atau 10,95 %, SLTP 5.712 orang atau 13,91 % SLTA 6.696 orang atau 16,30 %, Akademi 5.701 orang atau 13,88 %, SI 407 orang atau 0,99 %, S2 1.691 orang atau 4,12 %, dan jumlah keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 41. 066 orang.

Dapat dijelaskan juga bahwa kebanyakan masyarakat setelah menamatkan Sekolah Menengah Keatas (SLTA) menyambung ke Akademi atau tempat kursus dibandingkan ke Perguruan Tinggi (kuliyah). Hal ini dikarenakan, karena masalah ekonomi, apalagi perguruan tinggi jauh dar daerah tersabut, dan menyambung ke Akademi atau kursus lebih cepat untuk mendapatkan perkerjaan dibandingkan menyambung ke Perguruan Tinggi.

Apabila dilihat dari jumlah keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat Daerah Kabupaten Karimun sangat memperhatikan pendidikan demi meraih kehidupan yang lebih baik.

C. Ekonomi dan Pariwisata

1. Ekonomi

Dalam membicarakan masalah sosial ekonomi masyarakat Karimun, maka tidak tidak lepas dari pendapatan dan mata pencaharian yang mereka tekuni yaitu dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat umum diantara ada yang berekonomi rendah, menengah dan tinggi. Sesuai mata pencaharian yang mereka tekuni, ada yang berkerja sebagai pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Mahasiswa, dan mulai yang berkerja sebagai buruh sampai yang berkerja sebagai pengusaha. Untuk lebih jelasnya tentang perkerjaan yang mereka tekuni dapat dilihat sebagai tabel berikut:

TABEL II.9
KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK BERDASRKAN
PERKERJAAN

No	Klasifikasi Pekerjaan	Orang	Persentase
1	Pegawai Negeri	4.880	11,88
2	TNI	58	0,14
3	Polisi	1.352	3,29
4	Tani	386	0,94
5	Nelayan	962	2,25
6	Pegawai swasta	3.577	8,71
7	Wiraswasta	2.676	6,52
8	Buruh	2.356	5,74
9	Pensiun	332	0,81
10	Sekolah atau Mahasiswa	7.544	18,37
11	Dagang	2.183	5,31
12	Tidak Berkerja	19.760	35,94
	Jumlah	41.066	100

Sumber data : Kantor Camat Karimun.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk di Daerah Kecamatan karimun berprofesi sebagai bersekolah atau mahasiswa yaitu 7.544 orang atau 18,37 %, dan diikuti berprofesi sebagai Pegawai Negeri 4.880 orang atau 11,88 %, Pegawai Swasta 3.577 orang atau 8,71 %, Wiraswasta 2.767 orang atau 6,52 %, Buruh 2.356 orang atau 5,74 %, Dagang 2.183 orang atau 5,31 %, Polisi 1.352 orang atau 3,29 %, Nelayan 962 orang atau 2,25 %, Tani 386 orang atau 0,94 %, Pensiun 332 orang atau 0,81 %, TNI 58 orang atau 0,14 % dan penduduk yang tidak berpekerjaan atau nganggur yaitu 19.760 orang atau 35,94 %, jadi jumlah keseluruhan dari penduduk berdasarkan pekerjaan yaitu sebanyak 41.066 orang.

2. Pariwisata

Sebagai salah satu tujuan Wisata di Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun memiliki banyak fasilitas yang mendukung usaha kepariwisatawan ini. Kondisi keberadaan hotel di Tanjung Balai Karimun dari tahun 2001 sampai dengan 2006 :

TABEL 11.10
KONDISI HOTEL BERIKUT JUMLAH KAMAR

No	Tahun	Hotel	Kamar
1	2002	72	2.521
2	2003	77	2.827
3	2004	75	2.765
4	2005	73	2.598
5	2006	71	2.478
	Jumlah	368	13.189

Sumber : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Karimun.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah hotel pada tahun 2002 berjumlah 72 hotel dengan memiliki jumlah kamar 2.521 kamar, dan pada tahun 2003 terjadinya peningkatan atau penambahan jumlah hotel yaitu 77 hotel dengan jumlah kamar 2.827, dan tahun seterusnya terjadinya penurunan pada jumlah hotel dan kamar. Pada tahun 2004 jumlah hotel 75 buah dengan kamar 2.765 uah, tahun 2005 jumlah hotel 73 dengan jumlah kamar 2,598 buah dan pada tahun 2006 jumlah hotel 71 buah dengan kamar berjumlah 2.478 buah. hal ini terjadi karena berkurangnya para wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Balai Karimun. Selain hotel ada beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti digambarbarkan dalam tabel berikut :

TABEL II.11
FASILITAS PENDUKUNG PARIWISATA

No	Jenis fasilitas	Jumlah
1	Panti pijat (Meseg)	23
2	Karaoke	13
3	Diskotik	3
4	Salon	12
5	Biro perjalanan	12
6	Restoran	57
7	Money Changer	14

Sumber : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Karimun.

Dan dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa fasilitas pendukung pariwisata yang terbanyak adalah Restoran dengan jumlah 57 buah, dan diikuti panti Pijat (mesege) dengan jumlah 23 buah, dan seterusnya money Changer 14 buah, Karaoke 12 buah, salon 12 buah biro perjalanan 12 buah dan diskotik 3 buah.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN

A. Latar Belakang Terbentuknya Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun.

Penanganan masalah penyakit masyarakat berupa kegiatan prostitusi memerlukan kerja yang serius. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun membuat sebuah kebijaksanaan bagaimana supaya daerah tersebut menjadi kota yang bersih dari penyakit masyarakat salah satunya kegiatan prostitusi. Pada saat ini daerah kabupaten Karimun dikenal sebagai daerah yang banyak melakukan kegiatan prostitusi.

Mencermati kenyataan itu pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengambil kebijaksanaan untuk menanggulangi penyakit masyarakat berupa kegiatan prostusi dengan mengeluarkan Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan.

Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Propinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota⁹. Didalam Peraturan Daerah No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan di Kabupaten Karimun menyatakan prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah-hadiah tertentu sebagai suatu transaksi perdagangan¹⁰.

⁹Tim Redaksi, *Pemerintah Daerah UU. No.32 Tahun 2004 Berserta penjelasannya*, (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2004), Cet. Ke-1, h. 4.

¹⁰ Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, *loc.cit.*

Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *pro-staure*, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal¹¹.

Para ahli memberikan definisi beraneka ragam tentang prostitusi atau pelacuran antara lain :

- a. Soedjono D. SH, mengatakan bahwa pelacur itu berasal dari bahasa latin “*prostitutio*” yang artinya sebagai pelaku terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan, sedangkan perzinahan itu sendiri berarti hubungan kelamin antara laki-laki dengan seorang perempuan, baik salah satu atau kedua-duanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, selain dari mereka yang berperanan dari adegan perzinahan itu. Atau dengan kata lain pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran¹².
- b. Mr. W. A. Bonger, mengatakan bahwa prostitusi adalah gejala sosial dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencariannya¹³.
- c. Iwan Block, menyatakan bahwa pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari perkembangan kelamin diluar perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk

¹¹ Kartini Kartono, *op. cit.*, h. 177.

¹² Soedjono, *loc. cit.*

¹³ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1982), Cet. Ke-1, h. 43.

persebadanan kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang dilampiaskan oleh yang bersangkutan¹⁴.

- d. Commenge, menyatakan pelacur adalah suatu perbuatan dimana seseorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya dari hidupnya kecuali diperolehnya sebentar-sebentar dengan banyak orang¹⁵.
- e. Paul Moediko Moelyono, menyatakan pelacuran adalah penjualan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak, guna pamer nafsu seksual orang-orang itu¹⁶.
- f. George Ryley Scott, menyatakan bahwa pelacur adalah seorang laki-laki atau perempuan yang karena imbalan upah, baik berupa uang atau lainnya atau untuk kesenangan pribadi dan sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya mengadakan hubungan kelamin yang sejenis atau dengan berbagai orang sejenis atau yang berlawanan jenis dengan pelacur itu¹⁷.
- g. P. J. d Bruine Van Amstel, menyatakan prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak lelaki dengan pembayaran. Definisi diatas

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

mengemukakan adanya unsur ekonomis dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki¹⁸.

h. Dr. Kartini Kartono, mengemukakan prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut :

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar nikah saja, tetapi termasuk juga peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya¹⁹.

i. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, menyatakan bahwa pelacur adalah setiap perhubungan

¹⁸ Kartini Kartono, *op. cit.*, h. 182-183.

¹⁹ *Ibid.*

diluar perkawinan yang asah oleh satu pelakunya dijalankan dengan maksud mendapatlkan suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain²⁰.

Adapun yang menjadi latar belakang tebentuknya Perda No. 06 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

a. Kondisi dan situasi sosial masyarakat.

Semakin banyaknya pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi yang berkembang selama ini yang berdampak negatif terhadap moral atau mental kualitas fisik masyarakat dan martabat bangsa di Kabupaten Karimun dan untuk kepentingan keamanan dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Karimun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dalam permasalahan-permasalahan pelanggaran kesusilaan dipandang perlu adanya penertiban dengan mengeluarkan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan.

b. Masalah Otonomi Daerah

Dengan disahkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan pengaruh bagi setiap daerah. Undang-undang Nomor 22 tahun 199 dirubah atau diganti lagi dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Di dalam Undang-undang tersebut menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

²⁰ *Ibid.*

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan²¹.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan pada daerah inilah yang memberikan peluang setiap daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah inilah yang dijadikan peluang untuk pemerintah daerah membuat kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerahnya termasuk juga pemerintah Kabupaten Karimun²².

B. Proses Terbentuknya Perda No. 06 tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun.

Adapun Proses terbentuknya Perda No. 06 Tahun 2002 ini melalui beberapa tahapan antara lain :

- a. Pemerintah Kabupaten Karimun (bagian hukum) dan tim yang ditunjuk menetapkan rumusan-rumusan untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menganalisa dan mendiskusikan masalah rumusan Perda yang disidangkan untuk dapat memberikan evaluasi terhadap rumusan yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Karimun, dengan sebuah kesimpulan bahwa rumusan Perda tersebut dapat disahkan dan diterima, dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten

²¹ Tim Redaksi, *op.cit.*, h. 3.

²² Sukriadi, Anggota DPRD KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 21 Agustus 2007.

Karimun, Setelah Perda ini diundangkan dalam lembaran daerah Pemda Kabupaten Karimun menunjuk tim untuk pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 yang terdiri dari Instansi Dinas Sosial, instansi kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan wewenang untuk menanggulangi pelanggaran kesusilaan²³.

C. Upaya (Strategi) Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Perda No. 06 tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan Perda No. 06 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Pekat (Penyakit Masyarakat).

Setelah disahkannya Perda tersebut pemerintah daerah membentuk Tim Pekat (penyakit masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang terdiri dari dari perjudian dan prostitusi sekaligus mensosialisasikan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang pelanggaran Kesusilaan. Penanggung jawab dari Tim Pekat langsung dibawah Bupati Karimun serta diketuai langsung oleh wakil Bupati. Wakil ketua dari Tim Pekat yang dibuat ini adalah perwakilan dari Polres, Kodim serta Sat Pol PP. Pelaksanaan dari sosialisasi ini adalah bagian Hukum Setda Bupati yang dilakukan ditingkat Kelurahan Desa. Sedangkan Dinas Sosial langsung turun ke masyarakat mensosialisasikan ke 8 Kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Karimun, Kecamatan

²³ M. Nasrul, Staf Sekretariat DPRD KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 21 Agustus 2007.

Moro, Kecamatan Kunder Kecamatan Kunder Barat , Kecamatan Kunder Utara dan Kecamatan Buru²⁴.

- b. Mensosialisasikannya melaui media massa.

Baik itu media masa elektronik maupun media cetak yang menjelaskan atau membeberkan isi dari perda tersebut terutama larangan terhadap melakukan kegiatan prostitusi.

D. Ketentuan Larangan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilan Di Kota Tanjung Balai Karimun.

Didalam peraturan daerah No. 06 tahun 2002 terdapat larangan tentang larangan pelanggaran kesusilaan pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa larangan dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku bagi siapapun yang karena perbuatan, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :

- a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu melakukan kegiatan prostitusi
- b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri orang lain atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi
- c. Menyediakan tempat, dan, mencari, mendatangkan, mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi
- d. Melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan ditempat-tempat umum.

²⁴ *Ibid*

- e. Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang dapat terbaca maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang melanggar kesusilaan²⁵.

²⁵ Pemerintahan Daerah KAB. Karimun , *op.cit.*, h. 3.

BAB IV

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 06 tahun 2002 Terhadap Penertiban Prostitusi Di Kota Tanjung Balai Karimun.

1. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan penertiban prostitusi.

Sesuai dengan Perda No 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terhadap ketentuan larangan pasal 2 Ayat (1) Dalam Daerah Karimun, siapapun dilarang melakukan pelanggaran kesusilaan, Ayat (2) Larangan dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku bagi siapapun yang karena perbuatan, sikap dan tingkah lakunya patut diduga ;

- a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu melakukan kegiatan prostitusi.
- b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri orang lain atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi.
- c. Menyediakan tempat, dan, mencari, mendatangkan, mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi.

Dan terhadap pembinaan pasal 6 pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban dalam wilayah Karimun melalui usaha Preventif, Refresif dan Rehabilitatif, maka dengan ketentuan peraturan daerah tersebut diatas, maka pemerintah daerah melaksanakan penertiban prostitusi dengan cara antara lain :

a. Melaksanakan Razia.

Razia merupakan salah satu usaha refresif yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi, dan meniadakan tindakan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun, razia ini dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang seperti kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan dilaksanakan sewaktu waktu.

Razia ini dilakukan ditempat-tempat yang diduga terjadinya pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi seperti ditempat penginapan atau hotel, tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, tempat salon kecantikan yang sering disediakan oleh pemilik tempat begitu juga di jalan-jalan raya atau umum yang sering dijadikan sebagai tempat taransaksi seks²⁶.

Razia ini dilakukan untuk menjaring atau menangkap para pelaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kegiatan prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun dan dari hasil data analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khusus tentang penanggulangan Perda kesusilaan No 06 Tahun 2002 Kupaten Karimun dalam rangka menghujudkan ketentaraman an ketertiban umum terutama penanganan prostitusi sepanjang Tahun 2006 telah diperoleh hasil sebagai berikut :

²⁶ Rahmadi, Staf Sat Pol PP KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 22 Agustus 2007.

TABEL IV.12
REKAPTULASI HASIL RAZIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL

NO	Bulan	Pekerja Seks Komersial
1	Januari	19 Orang
2	Februari	10 Orang
3	Maret	13 Orang
4	Afril	9 Orang
5	Mei	8 Orang
6	Juni	15 Orang
7	Juli	11 Orang
8	Agustus	15 Orang
9	September	23 Orang
10	Oktober	25 Orang
11	November	27 Orang
12	desember	25 Orang
	Jumlah	200 Orang

sumber : SAT POL PP KAB. Karimun, 2007

Tabel tersebut di atas mengagambarkan operasi penertiban dilakukan sepanjang tahun 2006 sebanyak 200 orang perkerja seks komersialyang terjaring dalam razia

Adapun prosedur atau tatacara pelaksanaan razia yang dilakukan pejabat yang berwenang dilapangan antara lain :

1. Menerima laporan dari seseorang atau kelompok orang atau masyarakat terhadap adanya kegiatan prostitusi disuatu tempat.
2. Melakukukan tindakan pertama ditempat kejadian seperti melakukan pemeriksaan dengan dengan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka seperti KTP atau alat bukti lainnya.
3. Membawanya ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut²⁷.

²⁷ *Ibid*

b. Melaksanakan penampungan sementara untuk diseleksi.

Setelah dilakukan penangkapan maka para tersangka ditampung sementara untuk dideleksi apakah para tersangka benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi dengan melakukan penyelidikan.

Setelah dilakukan penyelidikan dan tersangka tidak terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi maka akan dilepaskan tetapi apabila terbukti melakukan pelanggaran maka diproses lebih lanjut²⁸.

c. Melakukan usaha tindakan Rehabilitasi sosial kesusilaan.

Rehabilitasi sosial kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarahkan para pelanggaran kesusilaan agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupam masyarakat.

Tindakan Rehabilitatif yang dilakukan antara lain :

1. Dilepaskan dengan syarat.

Para tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi atau pelacuran akan dilakukan pendataan dan difoto setelah itu dilepas dengan syarat sebelumnya diberi peringatan dan diharuskan menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut dan apabila mereka tertangkap dua kali maka akan dikembalikan kekampung halaman²⁹.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Yulizar, Tata Usaha Sat Pol PP KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun 21 Agustus 2007.

2. Dimasukkan dalam Pantti Sosial Karya Wanita (PSKW).

PSKW Putri Tuiuh merupakan tempat penampungan pembinaan dan pelatihan bagi para WTS yang ada di Propinsi Riau Bertempat di Tanjung Pinang dan selama dilakukannya Perda No 06 tentang pelanggaran kesusilaan belum ada dikirim kesana walaupun nanti ada namun masih merasa kewalahan karena WTS yang ditangkap dalam razia tidak dapat semuanya diterima oleh Pantti PSKW karena tergantung dari beberapa orang WTS yang harus dikirim disana dan tergantung dana yang ada dalam pengiriman mereka sehingga beberapa harapan untuk pembinaan kurang efektif dikarenakan berbagai faktor³⁰.

3. Dikembalikan kepada keluarga atau ketempat asal.

Para tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi langsung didata secara lengkap lalu difoto kemudian dipanggilkan keluarga yang akan membawa PSK tapi jika tidak ada dikembalikan kekos-kosan mereka dan bagi mereka terjaring dua kali akan dipulang kekampung halaman. Para PSK yang ada di Kota Tanjung Balai Karimun bukanlah kebanyakan dari daerah tersebut melainkan kebanyakan pendatang atau perantau dari daerah lain seperti dari Jawa, Sumbar dan Sumut yang datang untuk mencari perkerjaan sementara didaerah tersebut tidak tersedia lapangan kerja yang cukup bagi mereka akhirnya mereka berprofesi sebagai PSK dan untuk mengembalikan mereka keluar atau kampung halaman pemerintah daerah juga mengalami kesulitan terutama dalam hal biaya

³⁰ *Ibid.*

pemulangan mereka karena tidak adanya alokasi dana dalam APBD Kabupaten Karimun untuk pembinaan dan atau pemulangan PSK ini dengan merupakan kendala tersendiri³¹.

Dan sepanjang tahun 2006 para PSK yang telah dipulangkan ke Daerah asal bisa dilihat di Tabel berikut :

TABEL IV.13
REKAPITULASA HASIL PEMULANGAN PSK KE DAERAH ASAL

NO	Bulan	Dipulangkan kedaerah asal
1	Januari	2 Orang
2	Februari	-
3	Maret	1 Orang
4	Afril	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	1 Orang
8	Agustus	3 Orang
9	September	5 Orang
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	9 Orang
	Jumlah	21 Orang

Sumber : SAT POL PP KAB. Karimun, 2007

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa PSK yang baru sanggup dipulangkan kedaerah asal sepanjang tahun 2006 sebanyak 21 orang.

d. Diserahkan Kepengadilan untuk di sidang.

Selama disyahkan atau dipelakukannya Perda No. 06 tentang pelanggaran kesusilaan terutama terhadap kegiatan prostitusi atau pelacuran di Kabupaten Karimun terutama di Kota Tanjung Baalai Karimun belum pernah sama sekali para tersangkanya yang terbukti melanggar ketentuan larangan Perda tersebut diserahkan kepengadilan untuk disidang tindak pidana ringan , karena sidang

³¹ *Ibid*

kasus Tripiring jarang dilakukan oleh pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai Karimun.

Para pelaku pelanggaran kesusilaan memang seharusnya dilakukan sidang tindak pidana ringan dengan memyerahkannya kepengadilan tapi karena jadwal sidang kasus Tipiring tidak rutin atau jarang dilakukan oleh pengadilan sementara hanya bisa dilakukan hanya melakukan pendataan, peringatan dan dan setelah itu dilepas kembali, dan tak jarang mereka kembali lagi beraksi melakukan kegiatan tersebut ³².

2. Sanksi Terhadap yang Melakukan Kegiatan Prostitusi.

Dan bagi yang melanggar ketentuan larangan Perda yaitu melakukan kegiatan prostitusi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana pasal 4 ayat (4) Perda No. 06 tentang pelanggaran kesusilaan yaitu barang siapa yang sengaja melanggar terhadap ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini , diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak –banyaknya Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).

Dan selama disyahkan atau diberlakukannya Perda No. 06 tentang pelanggaran kesusilaan belum pernah diperlakukan karena para pelakunya belum pernah diserahkan kepengadilan untuk dproses lebih lanjut dan yang hanya diperlakukan hanya didata ,diberi peringatan dan kemudian di lepas, dan apabila dua kali tertangkap maka akan dikembalikan kedaerah asal, dan itupun tidak semuanya bisa dikembalikan.

3. Wewenang Alat Negara Menindak Pelanggar Perda No. 06 Tahun 2002.

³²Sudirman, Kapolres Kota Tanjung Balai Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 25 Agustus 2007.

Pemerintah Daerah berwenang dalam menindak pelanggaran perda dan adapun instansi yang diberi wewenang dalam menindak pelanggaran Perda yaitu Kepolisian dan SAT Pamong Praja sebagai penegak Perda sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan; Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan perda dan peyelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dan adapun wewenangnya antara lain :

1. Menangkap atau menjaring dan menindak para pelaku pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah yang berlaku.
2. Menutup tempat-tempat yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi seperti tempat-tempat penginapan (hotel) mulai dari kelas atas sampai kelas bawah (wisma), tempat-tempat hiburan, panti pijat, salon kecantikan dan tempat yang diduga berkedokkan kegiatan prostitusi. sesuai dengan ketentuan penindakan pasal 3 ayat (1) dan (2) pada perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan yang menyatakan; ayat (1), Pemerintah daerah berwenang menutup tempat-tempat yang diduga terbukti digunakan untuk pelanggaran kesusilaan, ayat (2), penanggung jawab dan atau pemilik tempat-tempat yang telah ditutup sebagai mana ayat (1) pasal ini , dilarang melakukan kegiatan usahanya sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah atau pihak berwenang.

Perda ini dikeluarkan dengan maksud tidak terjadinya penglegalan terhadap tempat lokalisasi yang banyak terjadi pelanggaran kesusilaan , tapi nyatanya yang terjadi perda tidak pernah menutup tempat yang jelas

dijadikannya lokalisasi seperti Paya Labu dan Villa Garden maupun hotel, cape-cape atau diskotik sebagai tempat hiburan yang diduga sebagai tempat terjadinya perbuatan asusila³³.

Tetap dibukanya tempat tersebut agar perkerja seks komersial tidak berkeliaran didaerah perkotaan sehingga hanya didaerah tersebut saja mereka menetap dan walaupun terjadinya pelanggaran hanya didaerah tersebut, begitu juga dengan penghotelan yang sebagian besar penghuninya adalah wisatawan dari luar negeri selain tujuan mereka berbisnis juga melakukan kegiatan prostitusi dilain sisi juga tempat-tempat tersebut dibuka karna mendatangkan keuntungan besar bagi pemasukan APBD karna tempat tersebut diwajibkan membayar pajak, semakin banyak pengunjung akan semakin besar pendapatan daerah³⁴.

4. Usaha atau Upaya Pemerintah dalam Mencegah Munculnya Kegiatan Prostitusi.

Usaha atau upaya yang dilakukan pemerintah Daerah yaitu dengan melakukan Usaha preventif. Usaha preventif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi terkait serta didukung oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat berjuang untuk mencegah timbulnya pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi.

³³ *Observasi*, Tanjung Balai Karimun, 20 Agustus 2007.

³⁴ Rahmadi.

Usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pembinaan BAB VI, pasal 7 ayat (2) Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan yang berbunyi; Usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan antara lain dengan:

- a. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan.
- b. Penyuluhan dan bimbingan sosial.
- c. Pembinaan sosial.
- d. Peningkatan derajat kesehatan.

Dalam usaha penyuluhan dan bimbingan keagamaan pemerintah berkerja sama dengan tokoh-tokoh agama baik itu di instansi-instansi agama dan instansi pendidikan untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan agama kepada masyarakat terhadap larangan kegiatan prostitusi dengan memberikan solusi dan pemerintah daerah mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya akibat dari kegiatan prostitusi baik itu bagi kehidupan sosial maupun kesehatan dan berusaha untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan senantiasa meningkat drajat kesehatan terutama mencegah dan menyebarnya penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan prostitusi yaitu itu HIV atau AIDS³⁵.

³⁵ Syahrudin, Staf Dinas KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 23 Agustus 2007.

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Dari Pelaksanaan Perda No. 06 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Penertiban Prostitusi Di Kota Tanjung Balai Karimun.

Didalam pelaksanaan perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi tidaklah berjalan mulus seperti mana yang diharapkan oleh semua pihak tanpa adanya hambatan-hambatan.

Hambatan-hambatan tersebut bersifat internal dan eksternal, hambatan internal adalah hambatan yang datangnya daripemda itu sendiri terutama instansi yang diberikan wewenang untuk menjalankan atau menegakkan perda sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang datangnya dari luar, yaitu dari para pelaku pelanggar perda seperti PSK dan masyarakat stempat.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan ada beberapa hambatan-hambatan baik itu dari internal maun eksternal didalam pelaksaan perda No. 06 Didalam pelaksanaan perda No. 06 tahun tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi tidaklah berjalan mulus seperti mana yang diharapkan oleh semua pihak tanpa adanya hambatan-hambatan.

Hambatan-hambatan tersebut bersifat internal dan eksternal, hambatan internal adalah hambatan yang datangnya dari dalam yaitu dari pemda itu sendiri terutama instansi yang diberikan wewenang untuk menjalankan atau menegakkan perda ,sedangkan hambatan eksternal hambatan yang datangnya tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi antara lain :

1. Kurangnya personil yang diperlukan dalam rangka menertibkan para pelaku Asusila.

Dimana jumlah kepolisian yang ada di Kota Tanjung Balai Karimun sekitar 200 orang sedangkan SAT POL PP sekitar 110 orang. Jumlah personil tersebut tidak semuanya yang turun langsung kelapangan pasti ada yang bergarak dibidang administrasi yang akibatnya sedikit sekali jumlah kepolisian maupun Satpol PP yang bergerak di lapangan.

Dengan keterbatasan jumlah mereka maka sangat sulit untuk melakukan penertiban terhadap para pelaku asusila yang tidak hanya di jalan raya tapi diperhotelan, café maupun diskotik yang ada .

Selain itu terbatasnya tenaga Polwan diruang pelayanan khusus (RPK) karena di Polres Karimun Cuma hanya ada 3 Polwan saja, kurang tenaga polwan ini juga memberikan pengaruh karena ada tentunya hal-hal tertentu yang hanya diketahui oleh perempuan sehingga masih dibutuhkan tenaga Polwan³⁶.

2. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di instansi Sat Pol PP³⁷.

Untuk memproses kasus pelanggaran Perda pelanggaran kesusilaan, memerlukan tenaga penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran kesusilaan sesuai dengan kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 6 yang menyatakan:

³⁶ Sudirman.

³⁷ Yulizar.

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kemudian pada pasal 7 ayat(1) KUHAP dinyatakan bahwa; penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (10) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.

Jadi keberadaan PPNS mutlak diperlukan dalam setiap operasi penertiban prostitusi sedangkan Badan Sat Pol PP baru memiliki 1 orang tenaga penyidik pegawai negeri sipil sehingga tidak dapat berkerja secara optimal dalam menegakkan perda tersebut kelemahan ini secara langsung berdampak pada tidak tertanganinya kasus pelanggaran peraturan daerah Nomor 06 tahun 2002 secara baik.

2. Adanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran perda No. 06 tahun 2002 diluar prosedur oleh pejabat yang diberikan wewenang.

Tujuan dari penertiban kegiatan prostitusi adalah untuk menekan serendah-rendahnya mungkin praktek prostitusi yang jelas ditinjau dari ajaran agama manapun tidak bisa dibenarkan dalam perkatek operasional, saat melakukan razia operasi refresif dan dapat menangkap beberapa PSK, ada saja anggota yang melakukan penyelesain diluar prosedur yang berlaku, pada hal dalam Perda No. 06 tahun 2002 sudah ditegaskan bahwa pelanggaran Perda ini harus diperoses dalam sidang tindak pidana ringan, upaya penyelesaian

diluar prosedur oleh oknum anggota juga berdampak negatif terhadap upaya penegakan Perda³⁸.

3. Kurangnya kordinasi atau kerja sama antara instansi yang terkait didalam pemberantasan Dalam upaya penegakkan perda No. 06 tahun 2002.

Mengalami kendala kordinasi atau kerja sama, karena diduga kuat adanya aparat dari instansi keamanan tertentu yang yang menjadi backing dari kegiatan prostitusi, sehingga setiap kali diadakan operasi sudah bocor (diketahui oleh pihak mucikari atau PSK) bahkan setiap kali ada saja aparat yang berpakaian sipil yang mengintai operasi.

Biasanya para geromo juga memiliki jaringan dengan oknum dari instansi tertentu dengan imbalan uang atau setor atau bulanan, sehingga kordinasi untuk mensukseskan operasi justru merupakan senjata makan tuan.

4. Kurang berperannya dinas sosial dalam penaggulangan kegiatan prostiusi prostitusi itu sendiri

Hal ini dilihat dengan tidak adanya kebijakan atau program-program yang jelas dari dinas sosial didalam penangulagn kegiatan prostitusi terutama bagi para pelaku seperti para PSK untuk supaya mampu kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat³⁹.

5. Keterbatasan biaya atau dana yang dimiliki oleh pemerinth daerah sehingga tidak dapat menerapkan apa yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perda No. 06 tahun 2002

³⁸ Rahmadi.

³⁹ *Observasi*, Tanjung Balai Karimun, 23 Agustus 2007.

Hal ini terlihat dengan tidak adanya dana dari pemerintah daerah dalam penanggulangan kegiatan prostitusi, sebagaimana diketahui bahwa para PSK kebanyakan berasal bukan dari daerah tempatan tapi berasal dari luar daerah dan untuk mengembalikan mereka kedaerah asal membutuhkan dana, sehingga mereka tidak bisa dikembalikan dan akhirnya berkemungkinan mereka kembali berkerja sebagai pekerja seks komersial demi memenuhi kebutuhan hidupnya⁴⁰.

6. Kurangnya kesadaran dari perkerja seks komersial yang sering melakukan perbuatan Asusila.

Tujuan dikeluarkan perda ini salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, apabila kesadaran ini ada pada setiap perkerja seks komersial maka dia tidak akan mau terjat di dunia prostitusi yang mereka juga terancam dengan penyakit yang mematikan maupun dosa yang harus dipertanggung jawabkan dengan perkerjaan yang dijlankannya.

7. Semakin jelinya perkerja seks komersial dalam melakukan transaksi seks.

Sering aparat melakukan operasi atau razia tidak membuat jera perkerja seks komersial dalam melakukan aksinya, berbagai cara dilakukan mereka untuk melakukan aksinya, diantaranya adalah dengan tinggal (kost) dihotel sambil melakukan peraktek prostitusi sehingga tidak dipantau oleh aparat. Mereka kost di hotel secara kelompok sehingga biaya sewanya relatifnya murah. Dengan memilih kost dihotel maka transaksi seks makin mudah⁴¹.

⁴⁰ M. Nasrul.

⁴¹ Rahmadi.

8. Kurangnya dukungan warga masyarakat terhadap upaya pemerintah daerah dalam menertibkan pelanggaran perda.

Seperti diketahui bahwa perekonomian masyarakat di kabupaten karimun khususnya di kota tanjung balai karimun sangat tergantung pada sektor pariwisata yaitu dengan masuknya para turis singapura dan malaysia yang tujuan kedatangannya tidak lain untuk menikmati wisata seks, hal ini berlangsung cukup lama.

Pengaruh wisata seks ini juga sangat dirasakan oleh sektor usaha lain misalnya sektor perhubungan, rumah makan, kedai-kedai kopi, tukang ojek, pedagang kecil dan lain-lain, apabila sektor ini terganggu dalam artian aparat melakukan razia maka sektor perekonomian bagaikan lumpuh karena para turis takut masuk ke kabupaten karimun, dan praktis pendapatan masyarakat merosot. Hal tersebut diatas menimbulkan sikap antipati warga masyarakat terhadap aparat sehingga operasi refresif tidak mendapat dukungan dari warga masyarakat⁴².

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Penertiban Prostitusi Di Kota Tanjung Balai Karimun.

1. Terhadap Pelaksanaan

Sebelum menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban prostitusi terlebih dahulu dijelaskan pandangan Islam terhadap prostitusi atau pelacuran. Didalam Islam prostitusi dikenal dengan zina atau perzinahan.

⁴² *Ibid.*

Secara umum dalam artian sederhana zina atau perzinahan adalah hubungan kelamin diluar nikah⁴³. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan *me-wathi* nya seseorang laki-laki mukallaf terhadap Faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja⁴⁴. sedangkan Ulama Syafi'ah mendefinisikan zina yaitu memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya terlepas dari segala kemungkinan kesamaan secara alami perbuatan itu dilarang, dan dari definisi yang diberikan Ulama Syafi'ah di atas dapat ditarik hakikat yang merupakan kriteria dari perzinahan itu, yaitu:

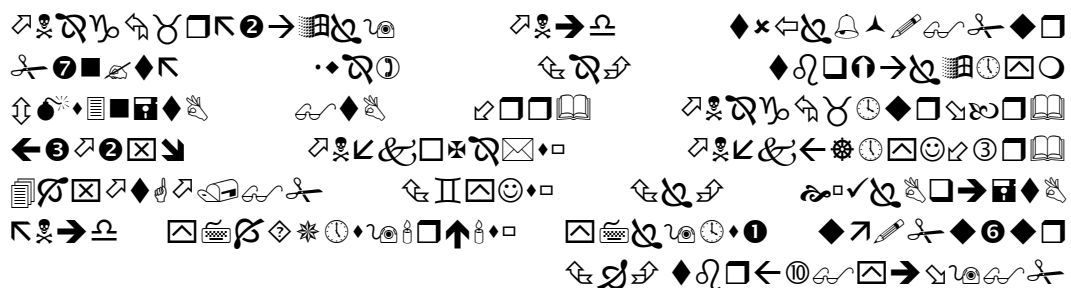
- a. Zina itu perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-laki atau zakar kedalam apa yang bernama alat kelamin perempuan atau vagina atau faraj.
- b. Perbuatan hubungan kelamin itu menurut zat atau substansinya adalah haram. Hal ini mengandung arti bila keharaman itu bukan bersifat substansil atau factor luar keadaan, tidak disebut zina. Umpamanya suami haram melakukan hubungan kelamin dengan isterinya yang sedang menstruasi.
- c. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah disenangi, yaitu dengan manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin dengan sosok mayat dan hewan tidak disebut zina.

⁴³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 274.

⁴⁴ A. Djazuli, *fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, Ed. 2, h. 35.

d. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat hukumnya bila pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan kesamaran atau *syubhat* seperti bersetubuh dengan perempuan yang diyakininya isterinya, ternyata orang lain⁴⁵.

Didalam Islam zina atau perzinahan dilarang secara tegas dan keras, dan dasar larangan atau keharamannya dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT:



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang melampaui batas. (QS. al-Mukminun 23: 5-7)”⁴⁶.

Dalam syari’at Islam tidak hanya zinanya itu yang diharamkan melainkan jalan-jalan yang ditempuh untuk terwujudnya perbuatan itupun tetap diharamkan sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT:.



⁴⁵ Amir Syarifudin, *op.cit.*, 277.

⁴⁶ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Departemen Agama RI, *al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), *Cet. Ke-1*, h. 341.

⁴⁸ *Ibid.*

Artinya: “Nabi SAW. Telah bersabda: tak ada dosa yang lebih besar setelah syirik disisi Allah selain dari seseorang lelaki yang mencurahkan maninya ditempat yang tidak halal baginya”⁴⁹.(HR. Bukhari).

Disamping itu Rasulullah SAW., bersabda:

لا يخلون احدكم بامرأة ليست له بمحرم فان تلتھما الشيطان. (رواه البخاري و مسلم عن ابن عباس)

Artinya: “Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram), karena yang ketiga adalah setan”⁵⁰.(HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Abas).

Prinsip keharaman ini sesuai dengan suatu kaidah yang berbunyi:

ما أدى الى الحرام فهو الحرام

Artinya: “Setiap sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram”⁵¹.

Besarnya dampak buruk yang diakibatkan oleh zina atau pezinaaan terhadap moral maupun kelangsungan hidup manusia sehingga Alla SWT. Melarang dan menghukumnya dengan keras. Ancaman hukuman dibedakan antara seseorang yang bersifat *muhsan* dengan yang tidak *muhsan*. *Muhsan* yaitu orang yang sudah baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah, sedangkan tidak *muhsan* (yang tidak mencukup syarat di atas), yaitu gadis dengan

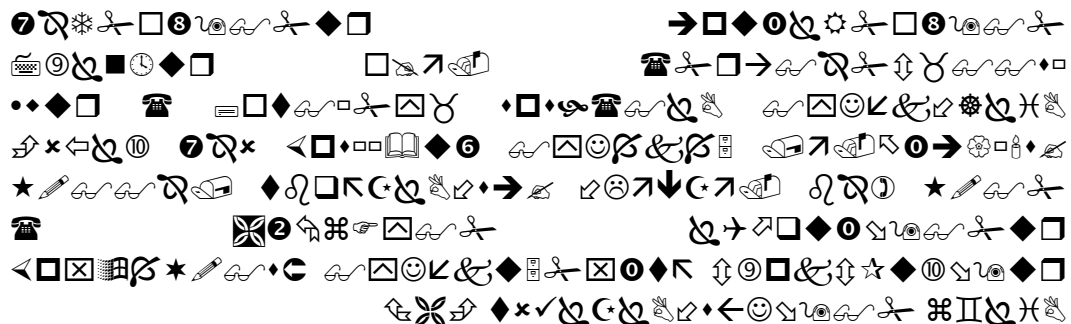
⁴⁹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari'at)*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), Cet. Ke-1, h. 308.

⁵⁰ A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 37.

⁵¹ *Ibid.*

bujang⁵². Terhadap pezina *muhsan* ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati, sedangkan terhadap yang tidak *muhsan* ancamannya adalah dera 100 kali dan dibuang satu tahun⁵³.

Alasan hukuman dera 100 kali, firman Allah SWT *surah an-Nur* ayat 2:



Artinya: “Perempuan dan lelaki yang berzina maka deralah setiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya yang akan mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaannya) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. (QS. an-Nur:2)”⁵⁴.

Hukuman 100 kali dera untuk pezina yang bukan *muhsan* itu adalah sebagai hukuman pokok yang langsung ditetapkan dalam al-Quran atau dikenal dengan hukuman *hudud*. Sedangkan hukuman tambahan untuk pezina yang bukan *muhsan* ini adalah dibuang selama satu tahun. Terhadap pelaku zina *muhsan* adalah rajam sampai mati. Ketentuan tentang hukum rajam itu tidak merujuk kepada firman Allah SWT., tetapi berdasarkan kepada hadits Nabi, yang berbunyi

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: PT, Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, h. 436.

⁵³ Amir Syarifudin, *op.cit.*, h. 280.

⁵⁴ Lajnah Penthashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *loc.cit.*

خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نفسى سنة
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة. (رواه مسلم)

*Artinya: “Terimalah dariku, terimalah dariku, terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka wanita-wanita gadis, jilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan janda (orang yang telah pernah kawin) dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu”*⁵⁵. (HR. Muslim).

Didalam Islam perundang-undangan atau peraturan peraturan disuatu daerah dikenal dengan istilah *Dusturiah*, menurut istilah dustur berarti kumpulan kaedah-kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis (konstitusi)⁵⁶, jadi bisa dikatakan dusturiah merupakan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang yang dibuat pemerintah untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan ummat.

Untuk mengukur bahwa suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan semangat syaria’at, untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagai mana diperintahkan Allah *surat al-Imran ayat 159* dan *al-Syura 38* sedangkan dari substansi harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.

⁵⁵ Moh. Nasir Chalis, *Fiqh Jinayah (Pidana Islam)*, (Pekanbaru: SUSQA Press, 2000), Cet. Ke 1, h. 33

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisai Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Cet., Ke-1, h. 154.

- b. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia didepan hukum.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*).
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalihwa daf' al-mafasid*)⁵⁷.

Begitu juga dengan peraturan daerah No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan berupa kegiatan prostitusi dan usaha atau upaya pemerintah daerah didalam menamnggulangi atau menertibkan kegiatan tersebut hendak lah sesuai dengan kriteria diatas terutama menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharathan.

Terhadap ketentuan larangan didalam Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama larangan terhadap melakukan kegiatan prostitusi tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karna Islam sendiri melarangnya sebagai yang telah dijelaskan di atas.

Apabila ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban prostitusi maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Terhadap mekanisme atau prosedur pelaksanaan

1. Melaksanakan razia

Razia dilakukan untuk menjaring para pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi dan tempat-tempat yang memfasilitasi atau menyediakan untuk supaya dapat melakukan kegiatan prostitusi dengan mudah. Razia dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi dan meniadakan kegiatan prostitusi. Hal

⁵⁷ *Ibid*

ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*), sebagai mana firman Allah SWT :



Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Imran 3:104”)⁵⁸.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diminta untuk mencegah (meniadakan) kemungkaran atau keburukan dan salah satunya termasuk kegiatan prostitusi atau pelacuran yang besar sekali dampak buruknya terhadap moral dan kelangsungan hidup manusia.

2. Melakukan penampungan sementara untuk diseleksi

Setelah melakukan razia para tersangka akan dibawa ketempat penampungan sementara seperti kantor Sat Pol PP atau Polisi untuk diseleksi dengan melakukau penyelidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui apakah para tersangka melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi. Hal ini juga termasuk usaha untuk untuk mencegah dari perbuatan keji atau mungkar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam

3. Melakukan tindakan tindakan Rehabilitasi sosial kesusilaan

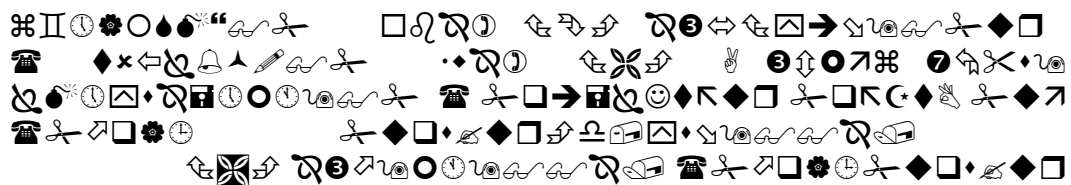
⁵⁸ Lajnah Penthasih Mushaf al-Quran Depertemen Agama RI, *op.cit.*, h. 138.

a. Dilepaskan dengan syarat

Adapun tindakan Rehabilitasi sosial yang dilakukan :

1. Dilepaskan dengan syarat

Sebelum mereka dilepaskan terlebih dahulu diperingatkan atau dinasehati agar tidak melakukan perbuatan tersebut dengan membuat surat perjanjian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Untuk saling nasehat menasehati didalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana firman Allah SWT :

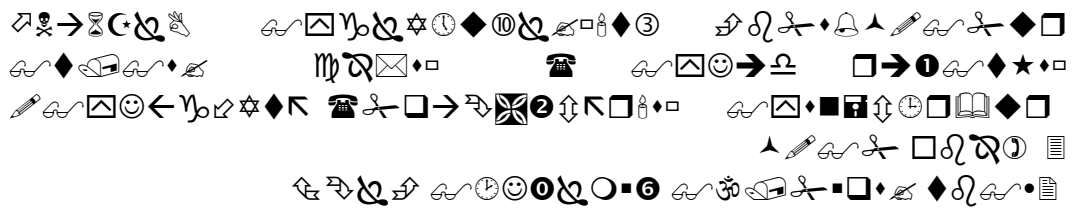


Artinya: “Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.” (QS. al-‘Asr 103:1-3)”⁵⁹.

2. Dimasukkan didalam panti sosial karya wanita (PSKW)

PSKW merupakan tempat penampungan pembinaan dan pelatihan atau keterampilan di dalam pekerjaan bagi WTS yang bertujuan agar mereka bisa kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat. Usaha upaya yang dilakukan seperti ini juga termasuk mencegah dari pada kemungkaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dan upaya ini juga dilakukan agar mereka sadar sebagai mana firman Allah Swt:

⁵⁹ Ibid



Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji

diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika keduanya tobat

(sadar) dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah

penerima tobat, maha penyayang. (QS.an-Nisa’ 4:16)”⁶⁰.

3. Dekembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal.

Bagi para PSK yang tertangkap dua kali didalam operasi razia dikembalikan ke daerah asal, sebagai mana diketahui bahwa para pelaku bukan kebanyakan dari daerah Kota Tanjung Balai Karimun melainkan dari luar daerah, hal ini dilakukan untuk mencegah dan meniadakan lagi kegiatan prostitusi dan jika ditinjau dari hukum Islam hal in tidaklah bertentangan.

4. Diserahkan ke pengadilan untuk di sidang.

Selama diperlakukannya Perda No. 06 tahun 2002 tetang pelanggaran kesusilaan belum pernah sama sekali para pelaku disaerah kepangadilan, yang seharusnya diserahkan karena disebabkan oleh beberapa hal yang sebagai mana yang telah dijelaskan bab sebelumnya.

b. Sanksi terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi.

Didalam Islam hukuman atau sanksi terhadap perbuatan zina atau pelacuran termasuk kedalam salah satu hukuman hudud atau had, yaitu hukuman yang

⁶⁰ Ibid

sudah ditentukan batas kadarnya oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an atau ditentukan besar sanksinya oleh al-Qur'an atau Hadist ketentuan itu berlaku secara mutlak yang tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh manusia⁶¹.

Apabila dibandingkan dengan hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang sebagaimana terdapat pada Perda No, 06 tahun 2002 tidak sesuai karena hukumannya tidak sama terhadap apa yang telah ditentukan didalam al-Qur'an dan Hadist, apa lagi pada saat ini pemerintah daerah hanya mampu memberikan peringatan atau nasehat bagi mereka yang melakukan perzinaan atau pelacuran, sedangkan menurut hukum islam, hukuman hudud tidak bisa gugur dengan hanya memberi peringatan atau nasehat apa lagi mereka sudah jelas-jelas melakukan kegiatan prostitusi atau pelacuran.

- c. Wewenang alat Negara dalam menindak pelanggaran Perda terutama kegiatan prostitusi.

Pihak yang diberi wewenang yaitu kepolisian dan Sat Pol PP berwenang melarang, menangkap para pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi, dan menutup tempat-tempat yang menyediakan untuk melakukan kegiatan prostitusi. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik atau ditegakkan jika tidak adanya pihak yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk menanggulangi permasalahan hukum yang dihadapi. Dan sudah seharusnya untuk bertindak sebagai mana hadis Nabi yang berbunyi :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإلم يستطع فليسلنه فان لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الا

⁶¹ M. Nasir Cholis, *op. cit.*, h. 3.

يمان

Artinya: “Siapa dari kalian mengetahui kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya (kekuasaannya), apabila tidak kuasa maka robahlah dengan lisannya, apabila tidak kuasa maka robahlah dengan hatinya (merasa benci), dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman”⁶².

Dari observasi peneliti kewenangan yang dimiliki belum sanggup direalisasikan karena pemerintah belum menutup tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang telah jelas melakukan kegiatan prostitusi dengan alasannya biar mereka tidak berkeliaran di daerah perkotaan atau daerah yang banyak masyarakatnya, sehingga di daerah tersebut saja mereka menetap, walaupun terjadinya pelanggaran kesusilaan hanya di daerah tersebut, dan alasan lain adalah tempat-tempat tersebut mendatangkan untung besar bagi pendapatan daerah atau perekonomian rakyat.

Dari alasan tersebut di atas tetap saja salah bila ditinjau menurut hukum Islam karena dengan tidak langsung telah membenarkan kegiatan prostitusi sedangkan kegiatan tersebut dilarang di dalam Islam. Dalam al-Qur'an cara seperti ini berarti menyampaikan yang hak (benar) dan yang bathil (yang tidak benar) secara bersamaan.

Sebagaimana firman Allah SWT :



⁶² Adib Basri Musthofa, *Shahih Muslim*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Cet. Ke-1 h. 233.

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.(QS. al-Baqarah 2:42)”⁶³.

Dari hadis Nabi bahwa Rasulullah mengatakan bahwa yang benar sudah jelas dan yang tidak benar juga sudah jelas maka diantara keduanya merupakan perbuatan meragukan (*syubhat*) dan jangan dilakukan. (HR. Tabrani dan Umar bin Khatab).

Didalam Islam upaya atau usaha untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan lebih diutamakan bagaimana salah satu kaedah fikih yang berbunyi :

درء المفساد اولی من جلب المصالح

Artinya:”Menghindari bahaya lebih diutamakan dari meraih manfa’at”⁶⁴.

Dalam kaedah ini pemerintah daerah harus membuat kebijakan atau peraturan sesuai dengan skala prioritas, kalau dalam suatu masalah tedapat dua hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan tapi disisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya, seperti tempat-tempat yang disediakan untuk melakukan kegiatan prostitusi walaupun mendatangkan pendapatan bagi pemerintah tapi dampak buruk yang dirasakan sangat berbahaya.

a. Usaha dan upaya pemda dalam mencegah kegiatan prostitusi

⁶³ Lajnah Penthasih al-Quran Depertemen Agama RI, *op.cit.*, h.7.

⁶⁴ ‘Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), Cet. Ke-1 h. 65.



Dan Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang selalu menyerukan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah SWT :



⁶⁵ Lajnah Pentashih Mushafn al-Qur'an Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 63.

Artinya: “Kamu (ummat islam) adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.....(QS. al-Imran 3:110)”⁶⁶.

2. Terhadap Faktor-faktor Penghambat dari Pelaksanaan.

Pelaksanaan Perda No, 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama penertiban kegiatan prostitusi belum terlaksana dengan optimal ini dikarenakan oleh oleh dua faktor yaitu Intern dan Ekstern.

1. Faktor Intern

Hambatan hambatannya yang datang dari dalam yaitu dari Pemda itu sendiri terutama instansi-instansi yang diberikan wewenang untuk menanggulangi permasalahan penertiban prstitusi dan hambatan-hambatan itu antara lain; kurangnya personil yang diperlukan dalam rangka menertibkan kegiatan prostitusi, kurangnya tenaga penyidik pegawai negeri (PPNS) di instansi Sat Pol PP, adanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran Perda No. 06 tahun 2002 oleh pejabat yang diberikan wewenang. Kurangnya kerja sama antara instansi terkait didalam pemberantasan prostitusi, kurang berperannya dinas sosial dalam penanggulangan kegiatan prostitusi dan keterbatasan anggaran atau biaya dari pemerintah Daerah.

Apabila hambatan-hambatan interen ini ditanggulangi atau dicari solusi dengan baik agar upaya atau usaha didalam mencegah dan meniadakan kegiatan prostitusi bisa berjalan dengan baik dan menyampai kepada tujuan

⁶⁶ *Ibid.*

yang diinginkan bersama, maka tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan hendaklah ada (tersusun) diantara kamu, segolongan yang (kuat teroganisir) yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma’ruf dan melarang melakukan perbuatan yang mungkar, mereka yang berlaku demikian orang-orang yang menang.”⁶⁷

Begitu juga dengan Dinsos hendaknya berperan dengan lebih baik. Apabila Dinsos membuat kebijakan dan melaksanakan dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi dan meniadakan kegiatan prostitusi tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan hambatan yang datangnnya dari luar yaitu para pelaku pelanggar perda seperti PSK dan masyarakat setempat dan hambatan itu antara lain; kurangnya kesadaran dari perkerja seks komersial yang sering melakukan perbuatan asusila dan semakin jelinya mereka dalam melaksanakan transaksi seks yang seharusnya mereka sadar bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Allah SWT., Telah tegas dan jelas melarang untuk tidak melakukan perzinaan apa lagi menjadikan perbuatan zina sebagai propesi atau perkerjan ataupun menjadikannya sebagai kebiasaan, makanya

⁶⁷ Ibid

Allah SWT., menganjurkan ummatnya untuk menikah bagi yang telah sanggup, sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: “Kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang udah pantas kawin dari hambamu peria dan wanita. Jika mereka miskin, nanti Allah memberikan karunia kepada mereka. Dan Allah maha luas karunianya dan maha tahu. (QS. an-Nur: 32)”⁶⁸

Sedangkan bagi yang belum mampu hendaknya menahan diri. Dalam menahan diri Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa seseorang dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu. (HR. Bukhari dari Abdullah Bin Mas’ud).

Dari uraian firman Allah dan hadis Rasulullah di atas dapat dipahami bahwa tidak perlu ada kekawatiran terhadap mereka yang melakukan perkawinan. Allah memerintahkan agar manusia menghindari dari kesendirian dan Allah memberikan jaminan ekonomi melalui perkawinan. Dari ayat di atas tersebut dapat juga dijelaskan bahwa tidak ada alasan suatu pekerjaan seperti prostitusi dijadikan cara untuk mencari kehidupan ekonomi kecuali dipaksa, sedangkan ia sendiri tidak menginginkan perbuatan tersebut.

Terhadap dukungan masyarakat seharusnya masyarakat mendukung dan berkerjasama dengan pemerintah Daerah mencegah kemungkaran dan salah satunya kegiatan prostitusi bukan malahan mendukungnya dikarenakan

⁶⁸ Ibid

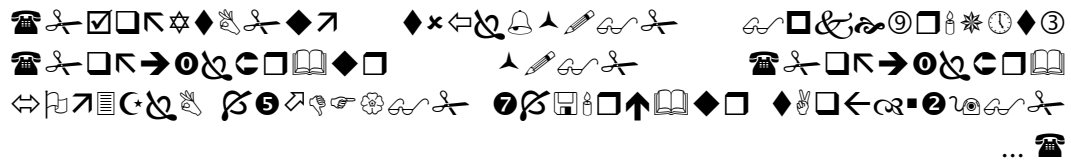
berpendapat atau merasa apabila kegiatan prostitusi atau pelacuran diberantas secara total maka akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka baik itu disektor pariwisata, perhubungan, perhotelan, rumah makan sampai ketukang ojek atau menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan prostitusi pendapat seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam walaupun kegiatan prostitusi itu ada untungnya bagi perekonomian masyarakat tidak sebanding dengan kerusakan atau bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut karena islam memegang prinsip bahwa menghindari bahaya lebih baik dari pada mengambil manfaatnya, dan Allah memerintahkan kita untuk mencari rezki yang halal dan baik, halal dalam cara mendapatkannya dan baik zatnya bagi kesehatan, dan mencari rezeki dengan melakukukan pelacuran atau menyediakan dan mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran adalah perbuatan yang tidak halal karena secara tidak langsung membiarkan orang untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, sebagai mana firman Allah SWT :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ الْفُجَرَاءِ الَّتِي سَلَكُوا لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ ۚ فَتَوَلَّوْا الْفُجَرَاءَ فَأَصْبَحُوا شُرَكَاءَ فِي أَعْمَالِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُذْمُومٍ﴾

Artinya: “Wahai manusia makanlah (dari makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Syaithan.sungguh syaithan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah :168)”⁶⁹.

⁶⁹*Ibid.*

Masyarakat wajib mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh penguasa apalagi peraturan itu sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin diantara kalian. (QS. an-Nisa' 4:59)"⁷⁰.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak, berdasarkan kata *athi'u* yang mendahului kata Allah dan Rasulnya sedangkan kepatuhan kepada *ulu al-amr* bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam⁷¹.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹ Muhammad Iqbal, *op.cit.*, h . 7.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan dan menguraikan secara konfrensif pembahasan skripsi pada bab terdahulu, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan khususnya pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun, belum optimal dilaksanakan, walaupun secara praktis pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang diberikan wewenang seperti kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda didalam membantu pemerintah daerah dan Dinas Sosial namun masih saja ada yang melakukan kegiatan prostitusi dan masih ada tempat-tempat yang menyediakan atau mempermudah untuk melakukan kegiatan prostitusi, berarti perda tersebut berjalan.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan perda No. 06 tahun 2002, baik yang bersifat interen maupun eksteren antara lain:
 - a. Kurangnya personil yang diperlukan dalam rangka menertibkan kegiatan prostitusi.
 - b. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di instansi Sat Pol PP sebagai penegak perda.
 - c. Adanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran perda diluar prosedur oleh pejabat yang diberi wewenang.

- d. Kurangnya koordinasi atau kerja sama antara instansi terkait didalam penanggulangan kegiatan prostitusi.
 - e. Kurang berperannya dinas sosial dalam penanggulangan kegiatan prostitusi.
 - f. Keterbatasan biaya atau dana didalam usaha atau upaya penanggulangan kegiatan prostitusi.
 - g. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang didalam melaksanakan perda terutama para perkerja seks komersial yang sering melakukan kegiatan prostitusi.
 - h. Semakin jelinya perkerja seks komersial didalam melakukan transaksi seks.
 - i. Kurangnya dukungan dari warga masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan pelanggaran perda.
3. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun mengeluarkan perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan sebagai usaha atau upaya untuk memberantas atau meniadakan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi yang semakin berkembang dan berdampak negatif terhadap moral atau mental kualitas fisik (kesehatan) masyarakat, merupakan kebijakan yang dibenarkan didalam islam. Apalagi kebijakan itu bermanfaat untuk kemashalatan masyarakat dan pelaksanaan yang dilakukan dengan maksud untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah atau meniadakan dari perbuata keji atau mungkar dan salah satunya adalah kegiatan prostitusi. Pelaksanaannya tidaklah melanggar nilai-

nilai islam, adalah sungguh dihargai dan dibolehkan menurut perspektif islam. Dalam hal ini para warga masyarakat wajib mengikuti dan mendukung kebijakan pemimpin(daerah Kabupaten Karimun) dalam melaksanakannya. Dan terhadap sanksi hukuman yang diterapkan terhadap pelanggar ketentuan pelanggaran kesusilaan terutama yang melakukan kegiatan prostitusi sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memberi ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 tidak sesuai dengan ketentuan hukuman yang ditentukan sanksinya oleh Allah terhadap perbuatan tersebut karena perbuatan zina itu telah ditentukan sanksinya, apalagi sanksi tersebut belum pernah diterapkan meskipun sudah ada yang melanggar dengan sengaja, dan yang baru bisa dilakukan pemerintah hanya memberikan nasehat atau peringatan, sedangkan hukum Allah tidak bisa gugur dengan hanya memberikan nasehat atau peringatan sebelum dilaksanakan apalagi perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukannya, dan tak jarang mereka kembali melakukan kegiatan tersebut karena lemahnya hukum yang diterapkan. Terhadap faktor yang menghambat dari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam karena setiap niat atau perbuatan yang baik pasti ada tantangannya selama senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu yang bersifat intern maupun ekstern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis tulis tentang pelaksanaan Perda N0. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusuilaan khususnya pelaksanaan penertiban terhadap kegiatan prostitusi dapatdisarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Begitu besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh prostitusi baik itu terhadap moral atau mental dan kesehatan masyarakat maka pemerintah daerah hendaknya serius dalam memberantasnya dengan melaksanakan Perda No. 06. Tahun 2002 dengan sepenuhnya berdasarkan dari ketentuan yang sudah ada tanpa adanya keraguan, dengan mengawasi dan menindak tegas terhadap para pelanggar Perda No.06 tahun 2002 terutama tempat-tempat yang selalu dijadikan sebagai kegiatan prostitusi dan memperbaiki hubungan kerja sama yang lebih baik antar instansi maupun masyarakat setempat terutama Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), dan pihak yang diberikan wewenang hendaknya bertindak tegas terhadap anggotanya yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. Hal ini harus dilakukan agar jangan ada anggota yang menyalahi prosedur didalam pelaksanaannya seperti mejadi bekingan kegiatan prostitusi seperti menutupi-nutupi atau membocorkan oprerasi razia dan selalu mencari solusi atau jalan keluar yang tepat dalam menangani kegiatan prostitusi.
2. Masyarakat setempat hendaklah mematuhi kebijakan pemerintah ddaerah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kebaikan bersama dan

membantu atau mendukung pemerintah daerah dalam menanggulangi kegiatan prostitusi.

3. Para pelanggar Perda baik itu PSK maupun tempat-tempat yang dengan sengaja menyediakan kegiatan prostitusi untuk dapat sadar dan meninggalkan dari usaha yang ia lakukan karma tidak sebanding dengan akibat buruk yang dirasakan baik perorangan maupun kelompok (masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, Prof., Dr., *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Perenada Media, 2003, Cet. Ke-1.
- A. Djazuli, Prof., MA., H., *fiqh Jinayat: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. Ke-3, Ed. 2.
- A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari'at)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1.
- Adib Basri Musthofa, *Shahih Muslim*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, Cet. Ke-1.
- Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994, Cet. Ke-1.
- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1982, Cet. Ke-1.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, Cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'ali, 2005, Cet. Ke-1, jilid1.
- Ghaiba, Sindu, Drs., dan Sopyan, Edy, Drs, *Karimun Dalam Angka*, Tanjung Balai Karimun: kerja sama BAPEDA dan BPS Kabupaten Karimun, 2005, Cet. Ke-1.
- Hamzah, Andi, *KUHAP & KUHP*, Jakarta: Reinika Cipta, 1990 Cet. Ke-1.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. Ke-7, Edisi 2.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Depertemen Agama RI, *al- qur'an dan terjemahan*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005, Cet. Ke-1.
- Moh. Nasir Chalis, *Fiqh Jinayah (Pidana Islam)*, Pekanbaru: SUSQA Press, 2000, Cet. Ke 1.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisai Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, Cet. Ke-1.
- Pemerintahan Daerah KAB. Karimun, *Peraturan Daerah NO. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Karimun*.

Soedjono D. SH, *Masalah Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977, Cet. Ke-1.

Tim Redaksi, *Pemerintah Daerah UU. No.32 Tahun 2004 Berserta penjelasannya*, Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2004, Cet. Ke-1.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjung Balai Karimun terutama pelaksanaan penertiban prostitusi.
 - a. Terhadap mekanisme atau prosedur pelaksanaan ?
 - b. Wewenang alat Negara menindak pelanggar Perda ?
 - c. Bagaimana upaya atau usaha Pemerintah Daerah dalam mencegah munculnya kegiatan prostitusi ?
2. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan ?
3. Bagaimana proses terbentuknya Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan ?
4. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan ?
5. Faktor apa saja yang menghambat dari pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama pelaksanaan penertiban kegiatan prostitusi ?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati langsung pelaksanaan penertiban prostitusi yang dilakukan Pemerintah Daerah terutama instansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Perda tersebut.
2. Mengganti langsung kegiatan prostitusi yang terjadi di Kota Tanjung Balai Karimun.
3. Mengamati langsung kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama pelaksanaan penertiban prostitusi.